

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Skripsi ini akan membahas tentang strategi politik luar negeri China terhadap kawasan Timur Tengah melalui program *One Belt One Road* (OBOR). *One Belt One Road* merupakan sebuah strategi China dalam menumbuhkan perekonomian negaranya serta mengembangkan konektivitas global. Program ini difokuskan untuk menciptakan jaringan yang akan memungkinkan aliran perdagangan bebas yang lebih efisien dan produktif serta integrasi pasar internasional yang lebih jauh dari segi fisik maupun digital.

Dalam menjalankan politik luar negerinya, China menggambarkan dirinya sebagai negara Dunia Ketiga yang mengejar "kebijakan perdamaian luar negeri yang independen." Dunia Ketiga berarti bahwa Cina adalah negara miskin dan berkembang, dan bukan bagian dari blok kekuasaan seperti di Amerika Serikat atau blok sosialis yang sebelumnya terkait dengan Uni Soviet. "Kemerdekaan" berarti bahwa Cina tidak bersekutu dengan kekuatan besar lainnya. Juru bicara China mengatakan bahwa negara mereka mencari perdamaian sehingga dapat berkonsentrasi pada pembangunan.

China mengatakan keputusannya mengenai pertanyaan kebijakan luar negeri berasal dari Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai: saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, tidak ada agresi bersama, tidak saling campur tangan dalam urusan internal masing-masing, kesetaraan dan manfaat bersama, dan hidup berdampingan secara damai. Pimpinan Cina awalnya menyebutkan prinsip-prinsip ini pada tahun 1954 ketika Cina, dengan pemerintah komunis, berusaha menjangkau negara-negara non-komunis di Asia.

Saat ini, Lima Prinsip masih melayani untuk tujuan yang bermanfaat. Mereka menawarkan alternatif bagi konsepsi Amerika tentang jenis baru tatanan dunia yang di dalamnya rezim dan lembaga internasional, sering mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai AS, membatasi hak-hak negara berdaulat untuk mengembangkan dan menjual senjata pemusnah massal, menindas oposisi dan melanggar hak asasi manusia, mengejar kebijakan ekonomi merkantil yang mengganggu perdagangan bebas, dan merusak lingkungan.

Desain alternatif China untuk dunia menekankan kedaulatan yang setara dan tidak dapat dilanggar dari semua negara besar dan kecil, Barat dan non-Barat, kaya dan miskin, demokratis

dan otoriter, masing-masing untuk menjalankan sistemnya sendiri sesuai keinginan, apakah metodenya sesuai dengan standar Barat atau tidak. Istilah Cina lainnya untuk sistem semacam itu adalah "multipolaritas."

Lima Prinsip menjelaskan mengapa Amerika seharusnya tidak dapat memaksakan nilai-nilainya pada negara-negara yang lebih lemah. Dengan demikian gagasan inti di balik Lima Prinsip sebagaimana ditafsirkan oleh Cina saat ini adalah kedaulatan - bahwa satu negara tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain.

Cina mengatakan "tidak pernah mencari hegemoni." Pada 1960-an hegemoni adalah kata sandi untuk ekspansionisme Soviet. Hari ini pejabat Cina menggunakan istilah ini untuk merujuk pada apa yang mereka lihat sebagai upaya Amerika satu sisi untuk menegakkan kehendak Amerika terhadap negara-negara lain dalam hal-hal seperti praktik perdagangan, proliferasi senjata, dan hak asasi manusia. Dengan mengatakan pihaknya tidak akan mencari hegemoni, China mengatakan kepada tetangganya yang lebih kecil bahwa pembangunan ekonomi Tiongkok dan kekuatan militer yang meningkat, tidak akan mengubah negara itu menjadi pengganggu regional. Posisi China didalam perselisihan yang terjadi di seluruh dunia yakni mereka harus menyelesaikan perselisihan tersebut melalui perjanjian damai. Ini merupakan pandangan mereka terhadap perang antara Iran dan Irak, perjuangan antara Israel dan Arab, persaingan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan konflik di bekas Yugoslavia.

China memiliki hak veto untuk memberikan suara "negative" atau *abstain* atas keputusan intervensi, perang saudara atau suatu kebijakan yang mengandung sanksi di dalamnya untuk bisa kembali konsisten terhadap prinsip dasar politik luar negerinya. Tentu saja, prinsip-prinsip moral yang diartikulasikan ini tidak berarti bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tidak realistis atau strategis. Dalam banyak kasus, prinsip yang diumumkan sebenarnya sesuai dengan kebutuhan strategi Cina. Terutama di tempat-tempat yang relatif jauh dari Cina, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, beberapa prinsip sederhana sebenarnya mencerminkan kepentingan Cina sebagian besar waktu.

Politik luar negeri China terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah mulai aktif sejak diadakannya Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung di Bandung pada April tahun 1955, yang mempertemukan petinggi China dengan petinggi dari sejumlah negara-negara Arab untuk pertama kalinya. Pertemuan ini mengarah pada hubungan ekonomi, budaya bahkan hingga mencapai level hubungan diplomatik diantara Peking dengan sejumlah negara-negara

Arab. Bahkan asal mula kebijakan China terhadap kawasan Timur Tengah bisa dilihat dari awal tahun 1940-an, jauh sebelum diadakannya Konferensi Asia-Afrika bahkan sebelum munculnya PRC.

Pada era Mao, kebijakan luar negeri China sangat bersifat ideologis. Dimana pada masa itu hubungan China dengan Negara-negara didasarkan pada hubungan Negara tersebut dengan Washington atau Moskow. Namun di awal mula era Deng Xiaoping pada tahun 1978, pendekatan ideologis ini dihindari karena pendekatan yang lebih praktis mendasarkan hubungan negara pada peluang perdagangan dan ekonomi untuk mendukung terciptanya modernisasi kolosal China. Oleh karena itu China mulai membangun hubungan diplomatik dengan seluruh negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan membangun ikatan ekonomi sederhana dalam bentuk penjualan senjata dan ekspor pekerja China. (The Diplomat, 2019)

Politik luar negeri China era baru saat ini yang di terapkan oleh Xi Jin Ping melalui visinya yang diberi nama *One Belt One Road* (OBOR) yang dimulai pada tahun 2013, lebih berorientasi pada *economic development* yang artinya setiap kebijakan yang mengatur segala urusan hubungan luar negeri China dengan negara lain harus mengarah kepada pengembangan kerjasama dalam lingkup ekonomi. Bagi Xi Jin Ping, pendekatan kerjasama ekonomi lebih mudah diterima dan lebih efisien dalam menciptakan *mutual development* yang dipandang akan berdampak jangka panjang bagi hubungan kedua belah pihak.

OBOR menjadi sebuah landasan politik luar negeri China dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara baik di Asia, Afrika, Eropa, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Menjadikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai fokus utama dalam menjalin hubungannya dengan negara-negara lain.

Pada tahun 2013, Presiden China, Xi Jin Ping membentuk strategi ekonomi baru yang disebut dengan *Belt Road Initiative* (BRI). Belt Road Initiative merupakan usaha ekonomi, geopolitik multifaset yang telah berubah melalui berbagai iterasi dari “Jalur Sutra Modern” menjadi “*One Belt One Road*”. Strategi ekonomi ini merupakan sebuah strategi yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah umat manusia. *Belt Road Initiative* ini pun memiliki dua komponen yang diantaranya yakni Sabuk Ekonomi Jalur Sutra atau *Silk Road Economic Belt* (SREB), dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21.

Presiden Xi Jin Ping meluncurkan OBOR pada saat kebijakan luar negeri China menjadi lebih tegas. Ini mengartikan bahwa OBOR lebih pantas ditafsirkan kedalam rencana geopolitik

ketimbang ekonomi murni. China menggunakan OBOR untuk menegaskan kepemimpinan regionalnya melalui program integrasi ekonomi yang luas. Presiden Xi Jin Ping melihat sumber daya ekonomi China yang cukup besar sebagai alat kunci dalam usahanya untuk menjaga stabilitas regional dan menegaskan kepemimpinan China dengan negara-negara tetangga di lingkungannya.

One Belt One Road (OBOR) Merupakan sebuah inisiatif regional yang signifikan yang di promosikan di era Xi Jin Ping. Inisiatif ini merupakan sebuah gambaran dalam pembentukan jalur sutera yang baru yang menghubungkan China dengan Asia Tengah dan Rusia, hingga Turki dan Eropa Timur, dan jalur sutera maritime yang menghubungkan China Selatan dengan Asia Tenggara, Samudera Hindia, dan Teluk Persia, hingga Mediterania. Proyek ini memperkirakan kekuatan hubungan komersial, serta pembangunan infrastruktur yang baru, seperti kereta api lintas benua berkecepatan tinggi dan pelabuhan-pelabuhan yang baru.

Dengan OBOR ini, China mempromosikan paradigma baru untuk tata kelola ekonomi regional, yang bertujuan memajukan kepentingan, norma, dan nilai-nilai China. Bersama OBOR, China bertujuan mengusulkan alternatif untuk pendekatan saat ini untuk pemerintahan global dan regional, yang sebagian besar berakar pada norma dan pendekatan yang berasal dan dipromosikan oleh Barat.

Namun didalam pengimplementasiannya, OBOR menemukan beberapa tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan yang muncul diantaranya yakni mencakup tantangan *regional security*, keamanan tradisional, seperti persaingan kekuasaan yang besar, perselisihan wilayah dan pulau, dan kekacauan politik di wilayah tersebut, serta ancaman non-tradisional seperti terorisme, pembajakan, dan kejahatan terorganisir transnasional. Dalam hal ini sangat penting bagi China untuk memfokuskan perhatian terhadap tiga masalah yaitu, pasokan barang keamanan publik, kepentingan Amerika Serikat dan Rusia di kawasan Timur Tengah, serta poros Pakistan selain dari pada mengembangkan kekuatannya sendiri.

Republik Rakyat China (RRC) dalam perkembangan perekonomiannya memiliki sejarah yang hampir sama dengan Eropa, yakni banyaknya terjadi peperangan dan diperparah dengan kemiskinan dan kelaparan yang terjadi secara besar-besaran. Namun pada abad ke-21 China berubah menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat. Dalam teori ekonomi sendiri kita juga mengenal istilah *The Asian Miracle* hingga dunia pun tidak dapat memungkiri bahwa kawasan Asia merupakan kawasan yang pertumbuhan ekonominya paling

cepat dengan melalui kerjasama perdagangan, bantuan infrastruktur, investasi, dan strategi ekonomi (Kebangkitan kekuatan china di awal abad 21, 2015).

Dengan perkembangan perekonomian China yang begitu cepat dan pesat, maka kini China pun mendapatkan posisi yang sangat penting di dunia Internasional. Bukan hanya sebagai peserta di dalam lembaga-lembaga internasional, namun juga ikut serta dalam proses-proses penting dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan didalam institusi Internasional. Dalam lingkup ekspor-impor, China merupakan negara pengekspor terbesar di dunia. Bahkan pada Agustus 2010 pertumbuhan ekonomi China sudah dapat melampaui Jepang dalam predikat pertumbuhan ekonomi terbesar ke dua di dunia yang artinya ekonomi China terbesar di kawasan Asia Timur (news world asia pasific, 2018).

Bagi China menjadi pemimpin ekonomi dunia merupakan hal yang sangat di harapkan karena ekonomi dan militer merupakan fundamental power dalam politik dunia. Negara tidak lagi menggunakan kekuatan militer dan perluasan wilayah lagi untuk menunjukkan seberapa kuat nya negara tersebut seperti yang dilakukan pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang bermula dari Tiongkok dan berakhir di benua biru (Eropa) sudah menjadi jalur perdagangan tersibuk di dunia. Diketahui bahwa China telah mendirikan 56 zona perdagangan dan kerjasama lebih dari 20 negara di sepanjang jalur *Belt and Road*, dan China pula telah menginvestasikan kurang lebih 18,5 USD (kompasiana, 2017). Diketahui pula bahwa *Belt Road Initiative* dipandang sebagai cara bagaimana China secara produktif dapat menggunakan cadangan modalnya yang sangat besar yakni sekitar 3 Triliyun USD untuk dapat menginternasionalisasi Renminbi (mata uang Tiongkok).

China pun telah membuka jalur kereta api “China Railway Express” yang merupakan jalur kereta api terpanjang di dunia yang melewati beberapa negara dan menyebrangi benua. Dimulai dari kota Yiwu, Tiongkok bagian Timur dengan melewati Eurasia dengan total panjang jalur 13.052 km dan membutuhkan waktu hingga 18 hari untuk mencapai titik akhir yakni di Madrid, Spanyol.

Sedangkan kawasan Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang besar jika dilihat dari sudut pandang geopolitik dan geostrateginya. Kita mengenal kawasan ini sebagai regime yang sangat menarik perhatian di berbagai belahan dunia, khususnya bagi bangsa barat sendiri. Ada banyak faktor yang membuat kawasan Timur Tengah ini menjadi rebutan bangsa-bangsa besar seperti Amerika, Inggris dan Prancis.

Bukan kebetulan bahwa Timur Tengah disebut sebagai gudang energi dunia dan memainkan peran utama dalam ekonomi dan politik global. Membandingkan dengan gudang bukanlah metafora, tetapi kebenaran. Dua pertiga dari cadangan hidrokarbon dunia terletak di wilayah tersebut. Wilayah tersebut sangat kaya akan bahan baku berkualitas tinggi, yang dipengaruhi oleh kondisi geologis, serta harga yang relatif murah (Popov, 2017).

Data pertumbuhan PDB di negara-negara di Timur Tengah merupakan indikasi dalam hal ini. Selama 10 tahun terakhir di Turki, PDB telah meningkat sebesar 27%, di Arab Saudi sebesar 55%, di Iran sebesar 20%, di UEA sebesar 35%, di Mesir sebesar 158%, di Irak sebesar 93%, di Oman sebesar 58%, di Oman sebesar 58% %, di Lebanon sebesar 93%, dan di Yordania sebesar 126% (Popov, 2017).

Terdapat banyak keistimewaan yang terkandung di dalamnya, yaitu diantaranya Timur Tengah jika dilihat dari segi geografisnya memiliki letak yang sangat strategis, dimana wilayah ini menjadi "jembatan" untuk menghubungkan tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Sehingga jika negara-negara besar tersebut dapat menguasainya maka akan memiliki akses yang cukup luas untuk mengontrol perkembangan yang terjadi diantara ketiga benua tersebut secara lebih dekat dan dapat lebih cepat dalam mengatasi atau mengantisipasi, selain itu juga semakin mempermudah dalam melakukan perdagangan lintas benua.

Secara umum di kawasan Timur Tengah sendiri terbagi atas dua kelompok, yakni kelompok yang kaya akan minyak dengan kelompok yang sedikit atau tidak ada minyak. Negara-negara yang kaya akan minyak pada umumnya berasal dari negara-negara teluk seperti Saudi Arabia, Kuwait, dan Persatuan Emirat Arab. Kelompok kaya akan minyak memanfaatkan sekali dan sangat bergantung pada keuntungan yang diperoleh dari minyak yang dimilikinya. Negara-negara tersebut kemudian tergabung dalam Kerjasama Negara-negara Teluk (Gulf Countries Cooperation) yang memanfaatkan minyak sebagai kepentingan serta kesejahteraan warga dan sekaligus mempertahankan sistem politik monarki absolut yang menguntungkan garis keluarga penguasanya.

Kawasan Timur Tengah mengalami beberapa fase perkembangan kondisi perekonomian. Perkembangan itu tidak lepas dari peran bangsa Eropa dengan munculnya revolusi industri dan menuntut untuk terpenuhinya kebutuhan pokok akan minyak bumi sebagai penggerak kegiatan industri. Penemuan minyak di Irak merupakan titik awal meningkatnya kepentingan bangsa-bangsa Eropa ke wilayah ini. Pada 1925 Perusahaan Minyak Irak (Iraq Petroleum Company)

dibangun, dengan konsesi untuk jangka waktu tujuh puluh lima tahun. Dengan berdirinya kilang minyak di Irak, peningkatan pendapatan pemerintah meningkat (Perkembangan Ekonomi Wilayah Teluk Arab, n.d.).

Dengan hasil ekspor minyaknya, untuk pertama kali memungkinkan melaksanakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir wilayah tersebut. Untuk lebih meningkatkan pendapatannya, pada 1950, sebuah dewan pengembangan dibentuk yang tugasnya mengontrol sebagian besar pendapatan dari minyak. Dewan ini juga bertugas untuk mengolah pendapatannya untuk kebutuhan pembangunan Irak, diantaranya; pembangunan dam-dam di anak sungai Tigris untuk pengairan lahan pertanian.

China memandang wilayah Timur Tengah sebagai mitra penting dalam inisiatif OBOR. Pada upacara pembukaan Forum Kerjasama Tiongkok-Arab keenam pada Juni 2014, Presiden Xi menyatakan bahwa Cina dan negara-negara Arab telah menikmati saling pengertian dan persahabatan sejak Jalur Sutra yang asli, dan merupakan mitra alami untuk bersama-sama membangun *One Belt One Road*. Dalam pidatonya, Presiden Xi menyarankan bahwa kedua belah pihak harus mematuhi prinsip diskusi, kerja sama, dan kerja sama untuk membangun komunitas yang memiliki kepentingan dan nasib yang sama.

Hubungan baik antara China dengan Timur Tengah sudah terjalin harmonis sejak era dinasti Han lebih dari 2,000 tahun yang lalu. China sangat antusias dalam mengembangkan hubungan baiknya dengan negara-negara di Timur Tengah sejak didirikannya pada tahun 1949. Kondisi Politik di Timur Tengah mengalami perubahan setelah berakhirnya Perang Dingin dan Perang Teluk ke II secara radikal. Kondisi demikian membuka peluang baru untuk perubahan dalam dunia hubungan internasional. (Zhang, 1999)

Namun bagi China yang baru, Timur Tengah merupakan tempat yang asing dan jauh. Pemerintah dan akademisi China kurang atau bahkan tidak peduli dengan urusan Timur Tengah seperti perang Arab-Israel, embargo minyak, dan lain-lain. Secara alami, dampak Cina terhadap Timur Tengah terbatas. Yang bisa dilakukan Cina adalah menekankan bahwa Cina, seperti kebanyakan negara Timur Tengah, telah menderita agresi dan pemerintahan kolonialis dan imperialis dan, seperti mereka, harus mempertahankan integritas wilayahnya dan kedaulatannya setelah kemerdekaan.

China yang baru, mencoba untuk menumbuhkan perekonomiannya yang telah hancur akibat dari peperangan yang terjadi selama bertahun-tahun, serta menghadapi beberapa ancaman

yang mendesak sehingga tidak memungkinkan untuk merumuskan sebuah kebijakan luar negeri yang memadai untuk Timur Tengah.

B. RUMUSAN MASALAH.

Bagaimana strategi China dalam mewujudkan visi *One Belt One Road* di kawasan Timur Tengah?

C. KERANGKA TEORI.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori diplomasi ekonomi. Menurut Rana, diplomasi ekonomi memiliki 4 fase dalam penerapannya. Pertama diplomasi ekonomi secara khusus menekankan pada aspek perdagangan. Dengan demikian kegiatan promosi merupakan komponen penting dalam fase awal melakukan diplomasi ekonomi. Kemudian fase kedua yakni fase pembentukan jaringan. Dengan melalui pendekatan diplomatik, aktor pendukung seperti perusahaan bisnis, kamar dagang, dan industri akan lebih mudah berkontribusi dengan berbagai aktivitas ekonomi masing-masing. Lalu fase yang ketiga yakni fase promosi negara.

Dalam hal ini diplomasi ekonomi dimaksudkan untuk menghubungkan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti tenaga kerja, pertukaran mata uang, dan pariwisata. Fase terakhir yaitu fase tahap regulasi. Pembentukan organisasi seperti WTO memberi dampak signifikan bagi kompleksitas perdagangan internasional. Dengan demikian, diplomasi ekonomi menjadi penting karena adanya tantangan dari setiap negara untuk mempertahankan kepentingan masing-masing dalam negosiasi regulasi perdagangan internasional.

Dalam skripsi ini penulis juga menggunakan konsep “politik luar negeri”. Untuk menjelaskan politik luar negeri China, bagian ini akan menguraikan konsep-konsep maupun bingkai teoritis yang diperlukan. Bagian ini tidak menawarkan kerangka baru dalam memahami politik luar negeri suatu negara. Namun, tujuan utama bab ini hanyalah untuk menjelaskan dinamika politik luar negeri China secara lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebagai pembahasan awal, perlu diskusikan pertama-tama tentang konsep Politik Luar Negeri.

Menurut K.J. Holsti, politik luar negeri merupakan “the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition—usually domestic—under which these actions are formulated.” Politik luar negeri menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional politik luar negeri suatu Negara bisa berupa menjalin hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka

pendek. Definisi lain tentang politik luar negeri bisa dilihat dari konsep yang dikembangkan oleh Walter Carlsnaes sebagai berikut, politik luar negeri merupakan “Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang berdaulat”.

Sedangkan, Rosenau mengkonseptualisasikan politik luar negeri ke dalam tiga konsepsi, dimana ketiga konsep tersebut satu sama lain saling terkait. Pertama, politik luar negeri dalam pengertian seperangkat orientasi (*a cluster of orientation*) yaitu berisikan seperangkat nilai-nilai ideal politik luar negeri suatu negara yang menjadi panduan pelaksanaan kebijakan luar negeri negara yang bersangkutan. Orientasi ini merupakan hasil dari pengalaman sejarah dan persepsi masyarakat terhadap letak strategis negaranya dalam politik dunia.

Kedua, politik luar negeri dalam pengertian sebagai strategi atau rencana atau komitmen untuk bertindak (*as a set of commitment and plans for action*) yang berisikan cara-cara dan sarana-sarana yang dianggap mampu menjawab hambatan dan tantangan dari lingkungan eksternalnya. Strategi suatu negara ini didasari dari orientasi kebijakan luar negerinya, sebagai hasil interpretasi elit terhadap orientasi kebijakan luar negerinya dalam menghadapi berbagai situasi spesifik yang membutuhkan suatu strategi untuk menghadapi situasi tersebut.

Ketiga, politik luar negeri dalam pengertian sebagai bentuk perilaku (*as a form of behavior*) merupakan fase paling empiris dalam politik luar negeri. Konsep ketiga ini merupakan langkah-langkah nyata yang diambil para pembuat keputusan dalam merespon kejadian dan situasi eksternal yang merupakan translasi dari orientasi dan artikulasi dari sasaran dan komitmen tertentu. Perilaku ini berbentuk baik tindakan-tindakan yang dilakukan maupun pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pemerintah. Perilaku politik luar negeri merupakan implementasi strategi kebijakan luar negeri suatu negara dalam situasi tertentu (2005: 53-55). Secara teoritis, politik luar negeri setiap negara akan banyak dipengaruhi oleh faktor dalam negeri dan faktor internasional (konteks internasional). Hal ini karena politik luar negeri dalam sebuah negara demokrasi bisa dilihat sebagai cerminan dari keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan oleh pemerintahnya di panggung dunia internasional. Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat

keputusan (para decision makers) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang dimaksud dengan tindakan politik luar negeri ? Tindakan-tindakan politik luar negeri pada hakekatnya adalah teknik- teknik yang digunakan oleh suatu negara sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik luar negeri yang ditetapkan. Tindakan-tindakan politik luar negeri ini dapat dibedakan berdasarkan teknik-teknis yang digunakannya. Holsti (1990) juga menjelaskan bahwa tindakan politik luar negeri dapat dibedakan menurut sarana-sarana yang digunakannya, yaitu, sarana diplomasi, propaganda, ekonomi, dan militer.

Perlu dijelaskan sarana-sarana tersebut diatas secara lebih rinci sebagai berikut: Pertama, sarana diplomasi: merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingan tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu kepada pemerintah negara lain. Diplomasi pada hakikatnya merupakan proses negosiasi dimana masing-masing pemerintah melakukan tawar-menawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya secara optimal melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati (Holsti, 1990: 130).

Kedua, sarana propaganda: merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan opini publik asing atau negara lain sehingga sesuai dengan dengan yang diharapkan oleh pemerintah negara yang melakukan propaganda. Pemerintah berupaya mempengaruhi opini publik asing atau negara lain, dan atau kelompok etnik, religi, dan kelompok ekonomi tertentu dengan harapan bahwa publik ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintahnya sesuai dengan harapan pemerintah negara yang melancarkan propaganda (Holsti, 1990: 151).

Ketiga, sarana ekonomi: merupakan upaya-upaya pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Bentuk manipulasi ini dapat berupa imbalan (rewards) maupun paksaan (coercion). Sebagai suatu sarana pemaksa, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah asing mengubah kebijakan-kebijakannya, baik domestik maupun luar negeri agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang melancarkan ancaman tersebut. Sedangkan sebagai sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah asing melakukan

atau terus tindakan-tindakan yang diinginkan pemerintah yang melancarkan imbalan (Holsti, 1990: 167). Terakhir, sarana militer, adalah upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer (Holsti, 1990: 192).

Dalam kasus ini kedua teori diatas dapat dijadikan landasan dalam menganalisa fenomena yang dibahas dalam penelitian ini. China dalam menjalin hubugannya dengan negara-negara kawasan Timur Tengah tidak luput dari kepentingan nasionalnya serta kebijakan politik luar negerinya. Dimana didalamnya terdapat berbagai macam kepenntingan dan dalam konteks ini China ingin mewujudkan visinya dalam program *One Belt One Road*.

D. HIPOTESA.

Strategi ekonomi China dalam mewujudkan visi *One Belt One Road* di kawasan Timur Tengah yakni:

1. Melakukan promosi industri dan pengembangan pasar di kawasan Timur Tengah, peningkatan kinerja ekonomi dan produktifitas di kawasan Timur Tengah, menurunkan biaya transaksional sehingga terciptanya peluang yang cukup luas bagi pengusaha dan meningkatnya tingkat kesejahteraan.

2. Melakukan kerjasama diplomasi bilateral dengan negara-negara di Kawasan Timur Tengah terutama negara yang mempengaruhi kebijakan *One Belt One Road*.. Terdapat beberapa strategi china dalam menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi OBOR. Ada 3 fokus, yakni kerjasama untuk penyediaan "*safe public goods*", lebih mengedepankan kepentingan atas negara-negara teman dikawasan Timur Tengah terutama negara-negara besar, serta mengakui peranan dari "pivot" Pakistan.

E. CAKUPAN PENELITIAN.

Cakupan dari penelitian politik luar negeri China terhadap Timur Tengah ini akan dibatasi dalam periode 2014-2018.

F. TUJUAN PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menambah wawasan mengenai politik luar negeri serta strategi China dalam mewujudkan visi *One Belt One Road* di kawasan Timur Tengah.

G. METODOLOGI PENELITIAN.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data-data dari sumber yang terpercaya serta melibatkan tinjauan pustaka.

H. GARIS BESAR PENELITIAN.

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab besar. Pada bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, kerangka teori, hipotesa, cakupan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta struktur penulisan. Lalu pada bab dua akan dibahas mengenai garis besar dari *One Belt One Road* (OBOR), sejarah tentang *One Belt One Road*, serta awal kemunculan dari visi *One Belt One Road* itu sendiri. Selanjutnya pada bab 3 dalam bab ini akan membahas tentang politik luar negeri China dan kepentingannya di kawasan Timur Tengah serta menganalisa ketertarikan China dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Lalu pada bab empat akan dijelaskan mengenai bagaimana strategi China dalam menjalankan pola politik luar negerinya dalam mewujudkan visi *One Belt One Road* di Kawasan Timur Tengah. Selanjutnya pada bab lima akan dipaparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian.